

Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia

Alil Rinenggo*¹

¹Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

E-mail: rinenggoalil@gmail.com

Abstrak

Sistem politik di Indonesia masih kental dengan sistem paternalisme dan oligarki. Hal ini justru dapat menghambat kemajuan sistem politik di Indonesia. Penulisan ini menggunakan teknik studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu artikel jurnal, berita, dan buku yang berkaitan dengan sistem dan budaya politik di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan sistem politik Indonesia ke depan yaitu peningkatan pelembagaan demokrasi dan SPI (Sistem Politik Indonesia) presidensialisme, serta penyesuaian pola kepemimpinan politik dan pemerintah. Peluang sistem politik Indonesia ke depan yaitu berpangku pada para pemuda yang memiliki peran penting dalam menentang sistem paternalisme dan oligarki yang sudah membudaya dan bisa mendobrak kemajuan sistem politik di Indonesia. Budaya politik masyarakat masih bersifat parokhial-kaula dan parokhial-partisipan. Sikap ikatan primordialisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Paternalisme dalam budaya politik Indonesia menjadikan pola orientasi dan sikap politik masyarakat bersifat patronage.

Kata Kunci: sistem politik, budaya politik, Indonesia

Abstract

The political system in Indonesia is still thick with paternalism and oligarchy systems. This can hinder the progress of the political system in Indonesia. This writing uses a literature study technique. Data were collected from various sources, namely journal articles, news, and books related to the political system and culture in Indonesia. The results of the study indicate that the challenges to Indonesia's political system in the future are increasing democratic institutionalization and SPI (Indonesian Political System) presidential, as well as adjusting the pattern of political leadership and government. The opportunity for Indonesia's political system in the future is to rely on youth who have an important role in opposing the paternalism and oligarchic system that has been entrenched and can break the progress of the political system in Indonesia. The political culture of the community is still parochial-chair and parochial-participant. The bond of primordialism is still deeply rooted in Indonesian society. Paternalism in Indonesian political culture makes the pattern of orientation and political attitudes of the people patronage.

Keywords: political system, political culture, Indonesia

PENDAHULUAN

Kemampuan sistem politik yang masuk ke dalam proses perubahan sistem merupakan suatu fakta, bahwa kemampuan untuk terus bertahan dengan sistem politik yang ada merupakan sebuah keniscayaan. Tekanan terhadap sistem politik dapat saja disebabkan oleh perubahan yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Sebagai bagian dari sistem yang luas, sistem politik Indonesia akan selalu mendapat pengaruh dari sistem politik di luar negeri. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh suatu tuntutan terhadap perubahan, tetapi yang paling penting yaitu kemampuan dari sistem politik itu sendiri dalam menjawab dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik (Komara, 2015: 118).

Pembangunan politik dalam arti teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional (Kadir, 2014: 4-5).

Munafrizal (2012) menjelaskan bahwa sistem politik demokratis diyakini mampu memfasilitasi kehidupan partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif, maka demokratisasi partai politik menyaratkan demokratisasi sistem politik terlebih dulu. Tanpa sistem politik demokratis, sulit muncul partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif. Dalam sistem politik non-demokratis, kehidupan partai politik umumnya tidak bebas, tidak otonom, dan tidak kompetitif.

Dalam rangka mendalami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satu hal yang penting yaitu memahami sistem politik dan pemerintahan. Sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk tetap menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan diharuskan memahami sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Melalui pemahaman tersebut diharapkan memberikan kesadaran agar Indonesia menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sukoco, 2012: 2).

Menurut Haryanto (2009: 134) runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998 menandai mulainya perubahan peta politik Indonesia, dan dapat dibaca sebagai titik awal pelemahan peran negara di satu sisi dan menguatnya kontrol masyarakat pada sisi yang lain. Seiring berlangsungnya perubahan peta politik tersebut, keberadaan dan peran elit politik lokal tidak lagi sepenuhnya ditopang dan tergantung negara. Di era demokratisasi mereka mempunyai kesempatan untuk tidak lagi berperan sebagai perpanjangan tangan negara (pemerintah pusat).

Sujito (2016) menjelaskan bahwa penyelenggaraan demokrasi pascareformasi secara formal prosedural dapat digolongkan lancar, damai, bahkan kian “mapan”, tetapi proses dan capaian perubahan tidak sesuai yang diharapkan. Corak reformasi politik justru makin kabur dikacaukan oleh banyaknya kasus korupsi, kegaduhan manuver politik dangkal, serta sejumlah keculasan menandai sengketa kuasa yang menyertai hingar bingar demokrasi. Di situlah muncul gejala, mungkin bisa disebut sinyalemen, bahwa demokrasi Indonesia terasa goyah. Jika demokrasi itu diibaratkan rumah atau bangunan, maka pilar penyangganya yaitu parpol, kebebasan sipil, serta penegakan hukum.

Menurut Hidayat (2019) jika para elit politik terjerat kasus korupsi disebabkan sistem politik di Indonesia. Sistem perpolitikan di Indonesia yang multi partai ini menyebabkan peluang terpilihnya kandidat lebih kecil, sehingga masyarakat bisa lebih fokus dalam memilih. Adanya mahar politik ketika mencalonkan menjadi kepala daerah juga membuat mereka berpikir untuk mencari cara mengembalikan modal. Hal tersebut juga sama dijelaskan oleh Wijayanto dan Nursahid (2019) bahwa pemilu memiliki biaya tinggi karena masifnya praktik politik uang merupakan catatan lainnya. Pemilu di era Reformasi semakin mahal dari mulai level lokal sampai nasional dengan Pemilu 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya pemilu yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara karena para calon terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.

Masyarakat tumbuh dan berkembang sebagai kelompok individu yang mendukung kebudayaan hasil karya dan warisan pendahulunya secara turun-temurun. Kompleksitas dari kebudayaan itu akan sangat tergantung pada kompleksitas masyarakat yang mendukungnya. Pada masyarakat modern, kebudayaan yang mereka dukung lebih kompleks bila dibandingkan dengan kebudayaan pada masyarakat sederhana. Perilaku manusia dalam masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku politik, sedikit banyak akan ditentukan oleh pola orientasi yang dimiliki dan proses belajar yang dialami oleh seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, bahwa untuk memahami perilaku politik perlu pula memahami kebudayaan politik masyarakatnya (Abdulkarim & Ratmaningsih).

Di era digitalisasi saat ini, masyarakat sudah mulai *melek* politik terhadap isu-isu yang dimainkan oleh aktor politik ataupun aktor di dalam pemerintahan. Contoh sederhana yaitu menyebarnya isu jabatan presiden: ‘tiga periode’ dan penundaan pemilu 2024. Isu ini justru datang dari aktor politik partai pendukung pemerintah. Akibatnya menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di tengah perekonomian Indonesia yang kurang stabil. Kemudian muncul reaksi dari berbagai kalangan khususnya dari seluruh BEM Indonesia. Pada bulan April 2022, mereka melakukan demonstrasi di Jakarta dengan mengajukan berbagai tuntutan kepada Pemerintah Indonesia. Setelah adanya demonstrasi tersebut, pemerintah Indonesia langsung menegaskan bahwa Pemilu 2024 agar segera dipersiapkan dan tidak akan ditunda. Dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sistem dan budaya politik Indonesia masih terbentur adanya kepentingan dan kekuasaan, belum nampak profesionalisme dan etika komunikasi publik yang baik.

METODE

Penulisan artikel menggunakan teknik studi literatur. Data digali dari berbagai sumber, yaitu artikel jurnal, berita, buku. Langkah-langkah dalam penulisan ini yaitu pertama, penulis membaca referensi yang berkaitan dengan sistem dan budaya politik di Indonesia. Kedua, penulis menganalisis data dari berbagai sumber yang sesuai dengan pembahasan. Ketiga, penulis menyajikan dan mendeskripsikan data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia

Pembahasan mengenai prospek sistem dan budaya politik di Indonesia, penulis akan memaparkan dan menganalisis beberapa masalah, tantangan, dan peluang yang terkait, sebagai berikut.

1. Masalah, Tantangan, dan Peluang Sistem Politik di Indonesia

Dalam studi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Surbakti, 1992). Perubahan politik dapat diartikan terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik pada periode tertentu ke periode lain atau dari sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila (Kadir, 2104: 3).

Pengalaman selama masa Orde Lama dan Orde Baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem politik yang stabil, malah sebaliknya timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada. Kondisi bangsa dan negara Indonesia masih jauh dari keadaan yang memadai. Lima syarat itu sangat penting bagi proses transisi menuju sistem demokrasi. *Pertama*, *civil society* yang bebas dan aktif. *Kedua*, masyarakat politik, termasuk elit parpol-parpol, yang relatif otonom. *Ketiga*, penegakan hukum. *Keempat*, birokrasi yang profesional. *Kelima*, masyarakat ekonomi yang relatif otonom dari negara dan pasar murni (Komara, 2015: 122).

Haryanto (2009: 145) menjelaskan bahwa perubahan sistem politik dari corak otoritarian menjadi demokratis membawa konsekuensi perubahan pada struktur yang ada. Jika semula, pada era otoritarian Orde Baru, struktur yang ada dimaknai sebagai pembatas atau pengekan bagi elit politik lokal tertentu; maka pada era reformasi yang kuat nuansa demokrasi, struktur yang ada tidak lagi dimaknai sebagai pembatas atau pengekan bagi elit politik lokal tersebut. Struktur baru yang ada pada sistem politik yang demokratis sekarang ini dapat dinyatakan memberi peluang yang sedikit banyak ‘memanjakan’ elit politik lokal. Atau

dengan perkataan lain dapat dinyatakan struktur yang ada dapat dimaknai memberdayakan elit politik lokal sebagai pelaku. Namun bagi elit politik lokal yang memaknai struktur yang ada pada zaman Orde Baru sebagai pemberdaya yang memberi peluang dan kemudahan baginya, maka perubahan sistem politik yang menghadirkan struktur baru dimaknainya sebagai pembatas atau pengekang. Elit politik lokal ini akan tetap pada posisi memegang kekuasaan kalau mereka mampu menyesuaikan dengan struktur yang baru; dan untuk keperluan itu mereka dituntut mampu merumuskan strategi menyiasati struktur. Dalam rangka menyiasati struktur, upaya untuk melakukan perubahan struktur dapat dilakukan oleh elit politik lokal sebagai pelaku melalui upaya tindakan yang oleh Giddens disebut sebagai de-rutinasi.

Heryanto (2018) mengungkapkan bahwa *Freedom in the World* 2018, yang dirilis lembaga *Freedom House*, sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di Washington DC dan kerap melakukan survei demokrasi skala global, menilai Indonesia dengan agregat skor 64 dari skala 0 tidak bebas dan 100 sangat bebas. Indonesia masuk kategori *partly free* alias sebagian bebas. Dalam deskripsinya, *Freedom House* menyebutkan Indonesia telah membuat catatan mengesankan sejak jatuhnya rezim Soeharto 1998. Indonesia membangun pluralisme yang signifikan dalam politik dan media serta mengalami transfer kekuasaan yang damai antarpihak. Meskipun demikian tantangannya, Indonesia masih berjuang dalam mengatasi praktik korupsi sistemis, diskriminasi, dan kekerasan terhadap beberapa kelompok minoritas, ketegangan separatis di wilayah Papua, dan politisasi undang-undang seperti penistaan dan penodaan agama oleh sebagian pihak. Beberapa peristiwa mendapat catatan khusus sebagai kunci peristiwa seperti polemik soal Hizbut Tahrir Indonesia, kasus Ahok, dan korupsi Setya Novanto.

Komara (2015: 172-173) menjelaskan bahwa pengalaman era reformasi memberi petunjuk bahwa peluang pembesaran ekonomi, berkoinisidensi dengan perkembangan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, yang dimungkinkan oleh peningkatan pelembagaan demokrasi dan SPI (Sistem Politik Indonesia) presidensialisme, serta penyesuaian pola kepemimpinan politik dan pemerintah. Penguatan lembaga demokrasi, yang berdampak pada kejayaan Indonesia, berlangsung sebagai berikut: 1) penguatan penghayatan nilai dasar (prinsip) demokrasi, untuk mengimbangi struktur demokrasi yang semakin efisien dan baku secara konstitusional; 2) penguatan perimbangan peran individu dengan kolektivitas; 3) penyeimbangan peran negara dengan peran pasar untuk mendorong dan mengandalkan kemajuan ekonomi; dan 4) penguatan konstitusionalisme.

Adapun penguatan lembaga SPI demokrasi presidensialisme, yang sudah terbukti paling berpotensi bagi memfasilitasi pengembangan keunggulan Indonesia, berkenaan dengan upaya: 1) memaksimalkan penerapan sistem politik dan pemerintahan presidensialisme, dengan menegaskan adopsi prinsip serta mekanisme pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, sebagai jaminan bagi keseimbangan dimensi horizontal dan vertikal sistem kekuasaan bersama batas fleksibilitasnya, dalam penataan dan penyelenggaraan negara; 2) memastikan efektivitas otoritas lembaga kepresidenan, dengan mengoptimalkan kekuatan politik pendukungnya, melalui penegakan sistem kekuatan politik mayoritarianisme; dan 3) memastikan kecukupan kapabilitas pejabat negara berdasar paket kualifikasi kepemimpinan transformasional (*administrator*), yang secara konsisten dimanfaatkan dalam pengkaderan dan pencalonan serta pemilihan umum.

Penguatan lembaga kepemimpinan politik dan pemerintahan, untuk mendukung kebesaran Indonesia, melalui pematangan demokrasi dan SPI presidensialisme, dengan cara: 1) menyiapkan kepemimpinan dengan maksud ganda, yaitu menyediakan kepemimpinan berjangkauan dan tokoh besar, dengan ketentuan memanfaatkan hasilnya yang terbaik; 2) penentuan kader terbaik didasarkan kepada standar kualifikasi pemimpin efektif dan demokratis, yaitu integritas, kapabilitas, ke-visian, dan kepahlawanan; 3) mempersiapkan

pemimpin kuat yang berbasis sosial-politik seluas mungkin, berdasar spektrum sikap ideologis; dan 4) menumbuhkan kepemimpinan politik dan pemerintahan pembaharu (*transformational / administrator*).

Peluang sistem politik Indonesia ke depan yaitu berpangku pada para pemuda yang memiliki peran penting dalam menentang sistem paternalisme dan oligarki yang sudah menjadi budaya dan bisa mendobrak kemajuan sistem politik di Indonesia. Menurut Irawan (2018) strategi yang perlu dilakukan pemuda dalam sistem politik, yaitu: *pertama*, menciptakan ruang politik yang sehat di media sosial. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2017, kelompok umur 19-34 mendominasi pengguna internet (49,52 persen). Angka yang besar ini berperan untuk menciptakan *demand* isu politik yang lebih mementingkan visi, misi, program peserta pemilu ketimbang isu dengan sentimen SARA dan hoaks. Sehingga kelompok umur ini bisa menjadi “pasar” Politis muda dan internet/sosial-media menjadi alat yang jitu nan ampuh untuk mensosialisasikan visi-misi dan program politik.

Kedua, berhimpun dan membuat gerakan tolak politisi yang buruk di lintas partai politik. Politisi muda hendaknya mengidentifikasi calon-calon bermasalah hukum. Lebih dari itu, politisi muda juga bisa mengidentifikasi calon dengan kewenangan kuat/petahana, rekam jejak buruk, dan keuangan tak akuntabel yang rawan melakukan korupsi.

Ketiga, merebut kepemimpinan politik yang bermartabat baik gagasan maupun praktik. Kampanye politik cerdas, berintegritas, ideologis harus terus digalakkan. Cerdas dalam arti pandai dalam memilih dan memilah cara *marketing* politik yang meliputi *political branding*, *political positioning* dan *political segmenting*. Berintegritas dalam hal ini yaitu integritas politik yang bersendikan nilai-nilai universal seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan berani menolak ketidakjujuran.

Generasi milenial banyak menggunakan teknologi komunikasi atau internet yang sering kita lihat generasi *booming* masa kini, mereka mengenal (*Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp* dll.) Menurut data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2018 lalu tercatat, bahwa populasi generasi milenial Indonesia sekitar 90 juta orang. Jumlah penduduk negara Indonesia usia 20-40 tahun perkiraan ditahun 2020 mendatang berjumlah 83 juta atau 34% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 271 juta jiwa. Potensi yang begitu besar bagi pemuda atau generasi milenial disambut baik dan menjadi perhatian khusus bagi para politikus yang ingin melanggengkan kekuasaan maupun bagi mereka yang ingin menjabat menjadi eksekutif dan legislatif di era demokrasi (Rizky, 2019).

2. Masalah, Tantangan, dan Peluang Budaya Politik Indonesia

Kuswandi (2010: 47) menjelaskan bahwa fakta yang terlihat di dalam masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokhial kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. Sikap ikatan primordialisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia menjadikan pola orientasi dan sikap politik masyarakat bersifat patronage. Hal ini nampak dalam pola-pola perilaku masyarakat termasuk pula dalam perilaku birokrat dan elit politik. Budaya politik masyarakat lebih didominasi parokhial kaula dan pada sisi lain diikat oleh primordialisme, maka hal ini cenderung tidak akan membangun demokrasi Indonesia yang konstruktif. Nilai-nilai yang dianut masyarakat telah membatasi dirinya untuk tidak bebas bergerak, termasuk dalam pengambilan keputusan di bidang politik baik pada aras pemerintahan pusat maupun di daerah.

Dalam kehidupan politik Indonesia yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi Pancasila akan didapati tipe campuran budaya kaula-partisipan atau parokhial-kaula. Terutama pada masyarakat pedesaan, tipe campuran yang lebih jelas terlihat yaitu parokhial-kaula, sebab kondisi dan alam pikiran masyarakat pedesaan lebih memungkinkan untuk terjadinya hal itu. Seperti diilustrasikan oleh Rusadi Kantaprawira (Abdulkarim & Ratmaningsih, 6), bahwa:

Budaya Indonesia yang bersifat parokhial-kaula disatu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari hubungan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primordial. Sedang di lain pihak kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern (barat), kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab integrasi, seperti: agama, kesukuan, dan lain-lain.

Ciri-ciri budaya politik Indonesia yang parokhial-kaula dan kaula-partisipan itu antara lain adalah masih kukuhnya sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Pertumbuhan dan perkembangan budaya politik ini ada keselarasan dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada *output* dari penguasa.

Menurut Rusadi Kantaprawira (Riyanto, 2006: 11-14) mengkonstatasi budaya politik Indonesia, meliputi:

a. Konfigurasi subkultural di Indonesia

Pada prinsipnya masalah keanekaragaman subkultural di Indonesia telah dapat ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (*nation building*) dan pembangunan karakter (*character building*) yang cukup berhasil jika diukur dengan memandang jumlah penduduk, luas wilayah, latar belakang sejarah, dan rentang waktu.

b. Parokhial-kaula dan partisipan

Budaya politik Indonesia yang bersifat parokhial-kaula di satu pihak dan partisipan di pihak lain, di satu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memukul tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial, sedangkan di lain pihak kaum elit sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern (barat). Jadi budaya politik Indonesia merupakan budaya politik campuran yang diwarnai oleh besarnya pengaruh budaya politik parokhial-kaula.

c. Ikatan primordial yang masih kuat

Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu. Salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan primordial dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercemrin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan elit politik langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutmen dukungan.

d. Paternalisme dan patrimonial di Indonesia

Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial, sebagai indikatornya antara lain dapat disebut bapakisme, sikap asal bapak senang. Di Indonesia, budaya politik tipe parokhial-kaula lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada proses *output* dari penguasa.

e. Problema modernisasi dan tradisi di Indonesia

Dilema terjadi antara modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan, apakah pelembagaan dalam sistem politik Indonesia sudah siap menampung proses pertukaran (*interchange*) kedua variabel tersebut? Misalnya sesuai dengan tuntutan modernisasi, diharapkan tumbuhnya sifat kelugasan, rasionalisme, dan objektivitas dalam menilai suatu persoalan politik, yang dalam pola budaya (politik) Indonesia sering belum dikenal dengan mendalam.

Tantangan dan peluang budaya politik Indonesia saat ini yaitu adanya globalisasi. Paloh (2019) menyatakan bahwa globalisasi dapat memengaruhi pola perilaku serta cara berpikir anak bangsa dalam memandang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab, globalisasi di dalamnya juga melekat proses transformasi sistem nilai yang tidak akan pernah dapat dibendung, dan akan terus berlanjut sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola perilaku yang hingga saat ini masih ditemukan di negeri ini dan merupakan warisan leluhur negeri ini diantaranya yaitu pola perilaku yang dirangsang oleh suatu sistem nilai paguyuban atau kekeluargaan dan kebersamaan, musyawarah untuk mencapai mufakat, juga nilai gotong royong.

Meskipun globalisasi berdampak negatif pada pergeseran nilai-nilai budaya kewargaan Indonesia, namun di sisi lain juga memiliki peluang untuk menciptakan budaya politik yang partisipan. Dengan sistem digitalisasi di era globalisasi saat ini, masyarakat dengan mudah melihat fenomena politik di media sosial (*web* atau berita *online*, *instagram*, *twitter*, *youtube*, dll). Para penggiat sosial media sangat responsif menanggapi permasalahan-permasalahan politik yang ada di Indonesia. Misalnya; mereka dengan cepat menyebarkan isu-isu permasalahan politik melalui status dan grup di *whatsapp*, yang kemudian akan mempengaruhi orang lain untuk menyebarkan kembali, menilai dan mendiskusikan secara internal. Kebiasaan seperti ini secara tidak langsung akan merubah budaya politik yang pasif atau parokhial-kaula menjadi budaya politik partisipan.

Bonus demografi dengan komposisi penduduk muda yang lebih banyak di Indonesia saat ini memberikan peluang yang sangat baik. Demografi dan generasi muda Indonesia menjadi salah satu kekuatan penting untuk membangun sumber daya manusia yang unggul (Mulyani, 2019). Kualitas sumber daya manusia Indonesia menunjukkan semakin baik dilihat dari jumlah penduduk yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Dengan semangat belajar yang tinggi bagi para pemuda bangsa, baik di pendidikan formal, informal, maupun nonformal diharapkan bisa memahami fenomena politik dan isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Soetjipto Wirosarjono (Riyanto, 2006: 14) menjelaskan mengenai budaya politik masa depan yaitu falsafah, kelembagaan, wahana, dan pendidikan politik itu dinamikanya, berhadapan dengan realitas sosial, dan budaya yang berkembang dan berubah. Banyak negara untuk sampai pada kemapanan dalam budaya politik membutuhkan waktu untuk mengendapkan hadirnya budaya politik yang mantap. Budaya politik mantap ialah perilaku politik yang mencerminkan secara utuh dan setara dengan derajat perkembangan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa itu.

Penerapan Materi tentang Sistem dan Budaya Politik pada Pembelajaran PPKn

Materi tentang sistem dan budaya politik sangat relevan diterapkan pada jenjang SMP dan SMA/SMK. Guru dapat menjelaskan secara sederhana mengenai sistem politik dimulai dari tingkat desa sampai dengan tataran nasional. Hal ini bisa dicontohkan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem politik baik secara suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada. Guru perlu menjelaskan pentingnya memahami sistem dan budaya politik di Indonesia, karena sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang baik sangat ditentukan oleh pola pikir yang maju, rasional, dan tidak terjebak dalam politik identitas dalam menyikapi isu-isu permasalahan politik yang berkembang di masyarakat.

Budaya politik yang tercipta di masyarakat berawal dari pemahaman masyarakat terhadap sistem politik. Pengetahuan seseorang tentang sistem politik sangat ditentukan oleh cara ia belajar melalui pendidikan di sekolah atau media sosial yang saat ini lagi *trend*. Pemahaman yang diperoleh akan mempengaruhi sikap atau pandangan untuk menentukan pilihan politiknya. Saat pilihan politik tidak sesuai dengan yang diharapkan dari awal, maka ia

akan mengevaluasi secara menyeluruh, bahkan ia bisa berubah pilihan politiknya. Panatisme dalam pilihan politik perlu dihindari karena dapat menghilangkan akal sehat. Sikap yang perlu dibangun yaitu berpikir kritis terhadap isu-isu permasalahan politik di Indonesia dengan segala upaya memberikan masukan, solusi yang membangun bukan malah menghina atau menyebarkan berita hoaks untuk *black campaign*.

Pembelajaran PPKn di sekolah harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila (*civic disposition*) dengan cara menerapkan metode diskusi kelas, atau bisa menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Tema-tema yang diangkat dalam proses pembelajaran bisa mengambil isu-isu permasalahan politik di Indonesia yang notabennya ada kaitan antara aktor-aktor politik, pemerintah, dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang terkadang dirugikan. Biasanya dikaji melalui kebijakan yang merupakan *output* dari sistem politik yang berdampak pada masyarakat luas.

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi yang mengangkat isu-isu permasalahan politik di masyarakat menjadi sangat relevan. Peserta didik akan mampu berpikir kritis, tidak hanya mengomentari namun dapat menawarkan solusi terhadap isu permasalahan yang menjadi kajian di kelas (*civic skills*). Dengan berdiskusi, peserta didik akan memiliki keterampilan menyampaikan atau menanggapi pendapat dengan sopan. Jika kebiasaan diskusi dengan menekankan pemecahan masalah di masyarakat maka ruh dari budaya politik dapat terwujud baik dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.

Guru perlu memberikan pendidikan politik kepada peserta didik. Dengan memberikan pemahaman bahwa di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dari politik. Dua elemen besar di dalam politik yaitu kekuasaan dan kepentingan untuk mempengaruhi orang lain. Guru dapat menyadarkan kepada peserta didik bahwa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan demokrasi harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dengan cara bermusyawarah dalam menentukan keputusan bersama, menyampaikan pendapat dengan santun, menghargai pendapat orang lain, harus bisa menerima keputusan bersama secara *legowo*, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan umum dengan mempertimbangkan elektabilitas dan kapabilitas pasangan calon yang akan maju mewakili aspirasi rakyat, serta tidak terpengaruh dengan *money* politik.

SIMPULAN

Tantangan sistem politik Indonesia ke depan yaitu peningkatan pelembagaan demokrasi dan SPI (Sistem Politik Indonesia) presidensialisme, serta penyesuaian pola kepemimpinan politik dan pemerintah. Peluang sistem politik Indonesia ke depan yaitu berpangku pada para pemuda yang memiliki peran penting dalam menentang sistem paternalisme dan oligarki yang sudah menjadi budaya dan bisa mendobrak kemajuan sistem politik di Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan yaitu: menciptakan ruang politik yang sehat di media sosial, berhimpun dan membuat gerakan tolak politisi yang buruk di lintas partai politik, merebut kepemimpinan politik yang bermartabat baik gagasan maupun praktik dengan cara konstitusional.

Budaya politik masyarakat Indonesia masih bersifat parokhial-kaula dan parokhial-partisipan. Sikap ikatan primordialisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia menjadikan pola orientasi dan sikap politik masyarakat bersifat patronage. Adanya globalisasi menjadikan peluang untuk menciptakan budaya politik yang partisipan. Dengan sistem digitalisasi di era globalisasi saat ini, masyarakat dengan mudah melihat fenomena politik di media sosial (*web* atau berita *online*, *instagram*, *twitter*, *youtube*, dll). Para penggiat sosial media sangat responsif menanggapi permasalahan-permasalahan politik yang ada di Indonesia.

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi yang mengangkat isu-isu permasalahan politik di masyarakat menjadi sangat cocok diterapkan pada pembelajaran PPKn. Peserta didik akan mampu berpikir kritis, tidak hanya mengomentari namun dapat menawarkan solusi terhadap isu permasalahan yang menjadi kajian di kelas (*civic skills*). Dengan berdiskusi, peserta didik akan memiliki keterampilan menyampaikan atau menanggapi pendapat dengan sopan. Jika kebiasaan diskusi dengan menekankan pemecahan masalah di masyarakat maka ruh dari budaya politik dapat terwujud baik dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkarim, A., & Ratmaningsih, N. (tanpa tahun). *Budaya politik, partisipasi politik dan demokrasi sebagai sistem sosial politik Indonesia*. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?q=related:V2uAjbey818J:scholar.google.com/&scioq=Budaya+Politik,Partisipasi+Politik+dan+Demokrasi+Sebagai+Sistem+Sosial+Politik+Indonesia&hl=en&as_sdt=0,5
- Haryanto. (2009). Elit politik lokal dalam perubahan sistem politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), 131-148.
- Heryanto, G. G. (2018). Prospek konsolidasi di tahun kontestasi. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/204692-prospek-konsolidasi-di-tahun-kontestasi>
- Hidayat, S. (2019). Sistem politik Indonesia sebabkan maraknya kasus korupsi. Retrieved from <http://www.dakta.com/news/19144/sistem-politik-indonesia-sebabkan-maraknya-kasus-korupsi>
- Irawan, I. A. (2018). Peluang dan tantangan politisi muda di pemilu 2019. Retrieved from <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/peluang-dan-tantangan-politis-muda-di-pemilu2019>
- Kadir, G. (2014). *Pembangunan politik*. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?q=related:Iw9cuO1yRIAJ:scholar.google.com/&scioq=Pengertian+Pembangunan+Politik&hl=en&as_sdt=0,5
- Komara, E. (2015). Sistem politik Indonesia pasca Reformasi. *Jurnal Social Science Education*, 2(2), 117-124. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK>
- Kuswandi, A. (2010). Membangun gerakan budaya politik dalam sistem politik di Indonesia. *Governance*, 1(1), 40-50.
- Mulyani, S. (2019). Berkaca dari 2018, prospek ekonomi Indonesia tahun 2019 diprediksi Baik. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/berkaca-dari-2018-prospek-ekonomi-indonesia-tahun-2019-diprediksi-baik/>
- Munafrizal, M. (2012). Partai politik dan demokrasi di Indonesia menyongsong pemilu 2014. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(4).
- Paloh, S. D. (2019). Mewujudkan Indonesia maju di tengah tantangan global. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/253449-mewujudkan-indonesia-maju-di-tengah-tantangan-global>
- Riyanto, A. (2006). Budaya politik Indonesia. Disajikan dalam pra perkuliahan Program Studi PPKn PPs UPI.
- Rizky, A. (2019). Masa depan pemuda (milennial) dan politik Indonesia. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/alinrizky3034/5d78b7f30d82302475365453/masa-depan-pemuda-millennial-dan-politik-indonesia?page=all>
- Sujito, A. (2016). Mengatasi rapuhnya demokrasi. Retrieved from <https://tirto.id/mengatasi-rapuhnya-demokrasi-bn1D>

- Sukoco, M. (2012). Kajian sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/288670683>
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Wijayanto & Nursahid, F. (2019). Masalah-masalah demokrasi kita hari Ini. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d-4650749/masalah-masalah-demokrasi-kita-hari-ini>